

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Periode yang dinilai Tahun Penilaian	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah : 2022	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
OPD yang Dinilai	: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
Sumber Data	Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pembentukan dan penyesuaian daerah dalam rangka meningkatkan	
Sasaran Strategis (tebalkan sasaran yang dipilih)	1 Terfasilitasinya Segmen Batas antar kabupaten dan antar provinsi	
	Jumlah terfasilitasinya Segmen Batas antar kab/kota dan antar provinsi	
	Jumlah terfasilitasinya pemasangan pilar pada segmen batas antar kab/kota dan antar provinsi	
IKU Renstra OPD (tebalkan yang dipilih)	IKU	Target 2023
	1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan semua Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah	
	a. Jumlah Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi yang Disusun dan Dokumen Penerapan SPM Kabupaten/Kota yang terfasilitasi Penyusunannya	15 Dokumen
	b. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Supervisi/ Pendampingan Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14 kab/kota
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Menumbuhkan pemanfaatan potensi antar daerah melalui kerjasama Daerah	
	Tujuan Strategis :	
	Mendorong Semua Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota menginisiasi kerjasama	
	Sasaran Strategis :	
	Terfasilitasinya Segmen Batas antar kabupaten dan antar provinsi	
	IKU Strategis	
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan semua Urusan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		Palangka Raya, Desember 2022 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  Telah ditandatangani secara elektronik oleh : Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196908061989111002

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun Penilaian : 2022  
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026  
Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
OPD yang Dinilai : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sumber Data	Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Tujuan Strategis	Meningkatnya pengembangan kapasitas daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah		
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan semua Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah.		
	<b>Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD</b>		
	<b>Jumlah Kegiatan Supervisi/ Pendampingan Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi yang Disusun dan Dokumen Penerapan SPM Kabupaten/Kota yang terfasilitasi Penyusunannya		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Penyelesaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2020, penyelesaian laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator
	1	Terlaksananya konsultasi/ koordinasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2022	Penyampaian LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 kepada Pemerintah Pusat tepat waktu
Informasi Lain			Target tahun V 100%
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Terlaksananya koordinasi dan Monev Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 Terlaksananya evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2022		

Palangka Raya, Desember 2022  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908061989111002

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun Penilaian : 2022  
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026  
Urutan Pemerintahan : Keuangan  
OPD yang Dinilai : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data	Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
Tujuan Strategis	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari Guna Mendukung Pembangunan Hijau yang Berkelanjutan			
Sasaran Strategis (tebalkan yang dipilih)	1	<b>Meningkatnya penyelenggaraan fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah yang efektif dan efisien</b>		
	2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama dengan badan Usaha/Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah		
	3	Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama di Provinsi Kalimantan Tengah		
Program/ Kegiatan Unit Kerja				
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun V
	1.	<b>Meningkatnya penyelenggaraan fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah yang efektif dan efisien</b>	Jumlah fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen
	2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama dengan badan Usaha/Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta	Dokumen
	3.	Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama di Provinsi Kalimantan Tengah	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kerja Sama - Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama di Kabupaten/Kota	Dokumen
Informasi Lain				
Mendorong Semua Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota menginisiasi kerjasama pemanfaatan potensi daerah	1 Jumlah fasilitasi kerjasama pemerintah 2 Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/ Swasta 3 Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			

Palangka Raya, Desember 2022  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908061989111002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah														
Tahun Penilaian	: 2022														
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026														
Urusan Pemerintahan	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
OPD yang Dinilai	: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah														
Sumber Data	Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah														
Tujuan Strategis	Meningkatkan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum														
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	<b>1</b> Meningkatnya penyelenggaraan fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah yang efektif dan efisien <b>a. Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri</b> b. Jumlah usul draft dokumen topinimi unsur buatan														
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Sub Kegiatan</th><th>Indikator</th><th>Target tahun V</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</td><td>1 Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri</td><td>Segmen Batas</td><td>4</td></tr> <tr> <td>mengusulkan draft dokumen topinimi unsur buatan</td><td>Dokumen</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</td><td>Fasilitasi dan Dokumen</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun V	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri	Segmen Batas	4	mengusulkan draft dokumen topinimi unsur buatan	Dokumen	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Fasilitasi dan Dokumen	6
	Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun V												
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke kemendagri	Segmen Batas	4												
	mengusulkan draft dokumen topinimi unsur buatan	Dokumen	1												
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Fasilitasi dan Dokumen	6												
Informasi Lain															
Meningkatkannya Koordinasi dan fasilitasi konsultasi serta pembinaan dan monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Desa/ Kelurahan/ Kecamatan.	<p>Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, produk hukum penataan desa/kelurahan dan batas desa/kelurahan di provinsi kalimantan tengah</p> <p>Pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan/ kecamatan Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>Pelaksanaan koordinasi kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban</p>														
	<p>Palangka Raya, Desember 2022</p> <p>KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p> <p>Telah ditandatangani secara elektronik oleh :</p> <p> Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196908061989111002</p>														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah								
Nama OPD		: Badan Keuangan dan Aset Daerah								
Tahun Penilaian		: 2022								
Periode yang dinilai		: 2021								
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju Kalimantan Tengah BERKAH"								
Urusan Pemerintahan		: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
OPD yang Dinilai		:								

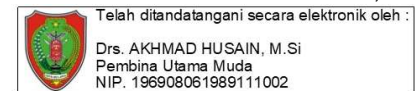
  

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju Kalimantan Tengah BERKAH"	Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Terlambatnya Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyajian laporan tidak sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan		Biro Pemerintaha n dan Otonomi daerah	Terlambatnya Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyajian laporan tidak sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan	Kemendagri	UC	penyampaian tidak tepat waktu	Pemprov. Kalteng
		Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Hasil Evaluasi LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai yang diharapkan		Biro Pemerintaha n dan Otonomi daerah	Penyampaian LPPD/LKPD dari OPD di Lingkup kalteng	OPD di Lingkup pemprov kalteng	UC	predikat yang Tidak/ kurang memuaskan	Pemprov. Kalteng

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut  
 Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra  
 Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis  
 Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko  
 Kolom e diisi dengan Kode risiko  
 Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko  
 Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*  
 Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)  
 Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko  
 Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum  
 Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nama OPD : BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Periode yang dinilai : 2021  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif  
 Sasaran strategis OPD : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju Kalimantan Tengah BERKAH"  
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
 OPD yang Dinilai :

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Toponimi, Tata Batas	Persentase Jumlah Segmen Penegasan Batas adm. Pemerintahan Kab/Kota yang diusulkan ke Kemendagri	Pelaksanaan	Tidak tersedianya data dan administrasi Desa dan Kelurahan sebagai dasar penetapan kebijakan daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terhambatnya proses penetapan batas desa/kelurahan	eksternal	UC	kebijakan pemerntah dalam penetapan batas administratif menjadi terhambat	Pemangku kebijakan pada kab/kota dan Provinsi
2	Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaraan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Fasilitasi Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksanaan	Tidak terfasilitasinya Otonomi Daerah Dalam Fungsi Penyelenggaraan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan,		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	manajemen kerja yang kurang optimal	internal	U	terhambatnya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan,	Pemprov. Kalteng
3	Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksanaan	Terlambatnya Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyajian laporan tidak sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	manajemen kerja yang kurang optimal	internal		Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pemprov. Kalteng
4	Meningkatkan Fasilitasi Hubungan Kerjasama Dalam Fungsi Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, Kerja Sama Antar Pemerintah, Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kab/Kota dalam pembinaan dan pengawasan kerjasama antar pemerintah Kab/Kota dan TKKSD Prov.Kalteng	Pelaksanaan	Terdapat Kab/Kota yang telah membentuk TKKSD		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak mematuhi ketentuan tentang kerjasama daerah	internal		Pelaksanaan kerjasama daerah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku	Pemkab/Kota

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/ unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196908061989111002

**Hasil Analisis Risiko**

<b>Nama Pemda</b>	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah				
<b>Tahun Penilaian</b>	: 2022				
<b>Tujuan Strategis Pemda</b>	: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju Kalimantan Tengah BERKAH"				
<b>Tujuan Strategis OPD</b>	: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan semua Urusan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
<b>Tujuan Operasional OPD</b>	Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi yang				
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I Risiko Strategis OPD 1:</b>					
	Tidak tersedianya data dan administrasi Desa dan Kelurahan sebagai dasar penetapan kebijakan daerah		4	1	4
<b>II Risiko Operasional OPD 2:</b>					
	Terlambatnya Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyajian laporan tidak sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan		3	3	9
<b>III Risiko Operasional OPD 3:</b>					
	Terdapat Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah membentuk Tim Kerjasama Pemerintah Daerah (TKKSD)		4	3	12

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908061989111002

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 3b dan 3c

Kolom c diisi dengan kode risiko (dikosongkan dulu)

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi (dari Matrik risiko)

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi (dari Matrik risiko)

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan (dari Matrik risiko)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Daftar Risiko Prioritas**

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah				
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2022				
<b>Tujuan Strategis</b>		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju Kalimantan Tengah BERKAH"				
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis OPD 1:</b>						
	Tidak tersedianya data dan administrasi Desa dan Kelurahan sebagai dasar penetapan kebijakan daerah				Kurangnya koordinasi antara Penjabat yang membidangi dengan OPD terkait dan mitra kerja Bagian Pemeintahan Kabupaten/Kota	Penetapan kebijakan terkait menjadi terhambat/tidak terpenuhi
<b>II Risiko Operasional OPD 2:</b>						
	Terlambatnya Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyajian laporan tidak sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan				Terlambatnya OPD di Lingkup pemrov Kalteng dalam menyampaikan LPPD OPD	Tidak perpenyhinya batas waktu penyampaian dan hasil opini yang kurang optimal
<b>III Risiko Operasional OPD 3:</b>						
	Kerjasama Daerah belum dillaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku oleh Kabupaten yang belum membentuk (TKKSD)				Terdapat Kab/Kota yang belum membentuk TTKSD	Kerjasama Daerah belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908061989111002



PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun Penilaian : 2022  
Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju Kalimantan Tengah BERKAH  
Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis										
	Tidak tersedianya data dan administrasi Desa dan Kelurahan sebagai dasar penetapan kebijakan daerah		Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota (bagian Pemerintahan) untuk inventarisasi data Adminstratif Desa/Kelurahan	Triwulan III 2022	Triwulan III 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
II Risiko Operasional										
	Terlambatnya Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyajian laporan tidak sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan		Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan Koordinasi dengan OPD di Lingkup pemrov Kalteng Untuk penyusunan LPPD dan LKPJ	Triwulan I 2022	Triwulan I 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
	Kerjasama Daerah belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku oleh Kabupaten yang belum membentuk (TKKSD)		Terjadi	Kurang informasinya Kab terkait kewajiban pembentukan TTKSD	Kerjasama Daerah kurang optimal		Koordinasi dengan kabupaten yang dimaksud untuk membentuk TTKSD	Triwulan IV 2022	Triwulan IV 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti

Keterangan  
Kolom a diisi dengan nomor urut  
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi  
Kolom c diisi dengan kode risiko  
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan  
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan  
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan  
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
 Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908061989111002